



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 794/XI/2013

III/NOVEMBER 2013



DPR Pantau Langsung Permasalahan TKI di Malaysia



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA NOVEMBER 2013

Minggu ketiga bulan November, fokus pada pembukaan Masa Persidangan ke II tahun Sidang 2013-2014, dan dilanjutkan dengan kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan (AKD) sesuai dengan agenda masing-masing.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Ali

Pembukaan Masa Persidangan ke II

Agenda rapat Paripurna pembukaan masa persidangan II dipimpin oleh Ketua DPR RI. Pada rapat paripurna ini diawali dengan pemberitahuan kepada rapat paripurna perihal adanya empat surat masuk dari Presiden yang ditujukan kepada Pimpinan DPR perihal: (1) masuknya Perppu Nomer 1 tahun 2013 tentang Perubahan ke-2 atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (2) usulan tentang calon anggota Dewan Energi Nasional dan pemangku kepentingan periode 2014-2019. (3 dan 4) perihal permohonan pertimbangan bagi pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara-negara sahabat untuk Republik Indonesia.

Materi Pidato Pembukaan Masa Persidangan ke II

Dalam pidatonya Ketua menyampaikan bahwa Masa Persidangan ke II akan berjalan selama 25 hari kerja. Dimulai pada 18 November dan ditutup pada 20 Desember 2013. Dalam masa sidang III yang akan datang, akan berjalan relatif singkat, lebih kurang 27 hari kerja, sebelum DPR menjalani masa reses ke III dan menyongsong Pemilu legislatif 2014. Ketua mengingatkan bahwa karena jadwal kegiatan DPR relatif pendek dalam masa-masa sidang tersebut, maka DPR harus mengoptimalkan semua pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan, utamanya fungsi perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan menjelang berakhirnya masa bakti DPR periode 2009-2014.

Di bidang perundang-undangan Ketua mengatakan bahwa banyak RUU yang harus dipacu penyelesaiannya karena kritikan tajam dari masyarakat berkaitan dengan rendahnya produk UU yang dihasilkan. Dewan memahami kritik ini, namun masyarakat juga perlu memahami bahwa fungsi perundang-undangan dilaksanakan oleh dua lembaga, DPR



dan Pemerintah. Seringkali pembahasan RUU tidak berjalan mulus karena adanya ketidaksepahaman atas materi perundang-undangan yang sedang dibahas.

Ada 36 RUU yang sudah memasuki pembicaraan tingkat I, bahkan 29 diantaranya telah mengalami waktu perpanjangan pembahasan. Dalam masa sidang ke II, dipastikan dua RUU segera diselesaikan pada awal masa sidang, yaitu RUU tentang Desa dan RUU tentang Perubahan UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ada 69 RUU yang diperkirakan selesai dalam masa sidang II, yaitu RUU kumulatif terbuka berkaitan dengan pembentukan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditangani oleh Komisi II, juga ada dua RUU kumulatif terbuka lainnya sebagai akibat putusan MK, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pasir dan Pulau-Pulau Kecil dan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir. 29 RUU sedang dalam proses penyusunan dan perumusan, dan beberapa RUU sudah disampaikan kepada Presiden menunggu penunjukan Menteri yang akan menangani.

Satu fungsi perundang-undangan yang lain, yang harus dilaksanakan oleh DPR pada masa sidang II yaitu pembahasan Perppu No. 1 tahun 2013 tentang Perubahan ke-2 atas II Nomer 24 tahun 2003 tentang MK. Sesuai dengan ketentuan UUDN RI tahun 1945, kewenangan Dewan terhadap Perppu adalah memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan, tanpa melakukan perubahan terhadap substansi Perppu yang telah dilakukan oleh Presiden.

Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, Ketua Dewan melaporkan bahwa Dewan telah menyelesaikan pemba-



hasan RUU APBN 2014 dalam masa sidang ke I. Walaupun berbagai besaran asumsi dasar ekonomi makro telah mendapatkan persetujuan Dewan, namun berbagai catatan telah diberikan oleh Fraksi-fraksi, menyusul disetujuinya RUU tersebut menjadi UU. Ada empat catatan pokok dari fraksi, yaitu: (1) berkaitan dengan subsidi BBM, agar dikelola tepat sasaran sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. Pemerintah harus mampu mengendalikan subsidi BBM agar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan sebesar 48 juta kilo liter. (2) pemerintah harus bersikap tegas dan berani dalam menentukan angka *cost recovery*, melakukan efisiensi dalam pengelolaan migas serta mendorong iklim investasi di sektor migras. (3) kebijakan pemerintah menutup defisit dengan pembiayaan utang dikhawatirkan akan mengakibatkan tambahan beban keuangan negara, yang membahayakan ketahanan ekonomi nasional. (4) menyoroti kebijakan insentif pajak dalam program pengadaan mobil murah, ramah lingkungan/*low cost green car*.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR-RI khususnya Komisi VI dan XI telah melakukan pembahasan intensif dengan Pemerintah, mengenai Pengakhiran Perjanjian Dasar/*Master Agreement (MA) Proyek Asahan PT. Inalum* antara Pemerintah Indonesia dengan konsorsium investor Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium (NAA), yang berakhir pada 31 Oktober 2013. Pengakhiran *Master Agreement* patut mendapat perhatian kita bersama. Seperti kita ketahui, *Master Agreement* telah berjalan selama tiga puluh tahun. Dengan persetujuan pengakhiran *Master Agreement*, berarti per tanggal 1 November 2013, pengelolaan PT. Inalum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia sebagaimana persetujuan yang diberikan Dewan.

Pengelolaan PT. Inalum harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan PT. Inalum harus dilakukan secara profesional, sehingga pengambilalihan kepemilikan PT. Inalum semakin memperkuat sumbuangan BUMN terhadap pendapatan negara.

Ketua dalam pidatonya juga meminta Pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan penuh bagi proses peralihan, pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2014, sehingga kehadiran OJK dapat mencapai tujuan, sebagaimana diterapkan dalam peraturan perundangan. Juga dimintakan perhatian tentang kesiapan pemerintah dalam melaksanakan BPJS kesehatan yang akan berlaku Januari 2014. Kesiapan harus dilakukan sebaik-baiknya, sesuai semangat pada saat pembahasan RUU BPJS di DPR tahun 2011.

Materi-materi lain yang diangkat oleh Ketua dalam pidatonya adalah tentang 10,4 juta DPT bermasalah yang sidang ditangani oleh KPU dan harus segera memperoleh verifikasi sebelum tanggal waktu 4 Desember 2013 dan juga tentang DPT luar negeri yang diperkirakan jurtaan WNI di luar negeri yang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014.

Masalah lain berkaitan dengan tenaga kerja, baik dalam

dan luar negeri. Demo buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dua hari berturut-turut di awal bulan November, telah menyita perhatian kita. Rapat penetapan Upah Minimum Provinsi Dewan Pengupahan, dijadikan momentum bagi buruh untuk menyuarakan tuntutan kenaikan upah, penghapusan sistem alih daya, *outsourcing*, dan pemberlakuan sistem jaminan kesehatan secara menyeluruh.

Sedangkan masalah ketenagakerjaan luar negeri berkaitan dengan pengakhiran proses amnesti bagi para pekerja migran ilegal di Arab Saudi sejak 3 November 2013. Terdapat 73.656 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam) TKI yang belum mendapatkan dokumen, baik perpanjangan izin bekerja maupun *exit permit* untuk Namun Dewan memberikan catatan bahwa pemberian dokumen ketenagakerjaan bagi TKI yang memperpanjang masa kerjanya di Arab Saudi, tidak dilengkapi dengan perlindungan yang cukup. Pemerintah harus bekerja keras untuk menangani masalah ini, setidaknya, memberikan jaminan agar TKI *overstayers* yang belum memiliki dokumen, tidak ditangkap/ditahan sampai masa pemulangan ke Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU.

Di bidang luar negeri, Dewan sangat prihatin terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia. Penyadapan yang dilakukan melalui kedutaan besarnya di Jakarta, merupakan persoalan serius dalam hubungan antarnegara. Penyadapan ini juga merupakan ujian bagi Indonesia di dalam memaknai kedaulatan Indonesia di hadapan para pemimpin dunia. Dewan mendukung langkah Menteri Luar Negeri RI memanggil Kuasa Usaha *Ad Interim* Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Duta Besar Australia sekaligus meminta penjelasan mengenai isu penyadapan ini.

Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia sepatutnya tidak terjebak dalam kerangka pikir pragmatis demi kepentingan diplomasi semata, melainkan harus melihat sebagai ujian kedaulatan bangsa Indonesia. Indonesia harus menuntaskan persoalan ini secara tegas, misalnya kepala negara meminta penjelasan langsung kepada kedua kepala negara tersebut sekaligus untuk membangun kesepakatan baru secara bilateral serta komitmen untuk menghentikan penyadapan terhadap negara lain.

Sebelum mengakhiri pidato pembukaan sidang ke II, Ketua Dewan mewakili rakyat Indonesia menyampaikan duta cita dan keprihatinan mendalam atas bencana besar dan terburuk tahun ini, yaitu bencana topan Haiyan, yang terjadi di Filipina Tengah, yang meluluh lantakkan kota-kota dan desa-desa, dan telah menelan korban ribuan jiwa. Juga keprihatinan mendalam berkaitan dengan meletusnya gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera utara yang menyebabkan lebih dari lima ribu warga mengungsi. Dewan meminta dilakukan koordinasi yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi dan menindaklanjuti dampak dari meletusnya gunung Sinabung, baik dari segi ekonomi, maupun kebutuhan masyarakat setempat, pencemaran udara dan rusaknya pemukiman warga.**

DPR Pantau Langsung Permasalahan TKI di Malaysia

Tim Pengawas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri - TP2TKILN DPR RI berkunjung ke Malaysia untuk memantau secara langsung sejumlah persoalan yang membelit warga negara Indonesia yang bekerja disana. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga di dalam negeri termasuk dengan KBRI akan menjadi perhatian Timwas yang dibentuk lintas komisi terkait ini.

“Kita ingin menghimpun masukan yang lebih spesifik dilapangan termasuk melihat sendiri apakah pemerintah kita dalam hal ini kementerian dan lembaga serta KBRI sudah berkoordinasi dengan baik untuk terwujudnya perlindungan terhadap TKI di Malaysia ini,” kata Adang Darajatun Wakil Ketua Timwas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (14/11/13).

Ia menambahkan TP2TKILN DPR juga akan menghimpun informasi terkait pelaksanaan program Pengurusan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) yang sedang gencar dilakukan Pemerintah Malaysia sampai tanggal 20 Januari 2014 nanti. “DPR akan berupaya bertemu dengan TKI yang bermasalah dengan hukum, termasuk yang terancam hukuman mati,” paparnya.

Pada bagian lain anggota Timwas Poempida Hidayatullah menggarisbawahi masalah data yang tidak sama diantara lembaga terkait. “Memang Indonesia sedang menuntaskan proyek eKTP jadi masih ditemukan sejumlah persoalan, ini berpengaruh pada interkoneksi KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri),” ungkapnya.

Politisi FPG ini berharap perwakilan



Wakil Ketua Timwas TKI-LN Adang Darajatun bertukar cinderamata dengan Perwakilan Parlemen Malaysia Ismail Mohamed Said.

Indonesia di luar negeri dapat membantu penyelesaian masalah data ini karena akan berpengaruh pada urusan terkait lain seperti imigrasi, bantuan hukum dan perlindungan lain bagi TKI, serta anggaran yang diperlukan.

“Saya minta rapikan data, secara real, item per item tahapan seperti apa, sampai dengan pengacara yang dipakai. Nama-nama dan alamatnya serta kasus perkasus yang ditangani sehingga advokasi benar-benar terpantau”, tegasnya.

Anggota Tim Pengawas Perlindungan TKI di Luar Negeri lain yang mengikuti kunjungan ini diantaranya Rieke Dyah Pitaloka (FPDIP), Djamal Aziz (FP Hanura), Diana Anwar (FPD), Hernani Hurustiati (FPG), dan Martri Agoeng (FPKS). Pihak KBRI yang hadir dalam kesempatan itu adalah Hermo, Wakil Kepala Perwakilan Menteri.

Pertemuan dengan Parlemen Malaysia

Selanjutnya Delegasi Timwas mengunjungi Parlemen Malaysia, diterima sejumlah anggota Parlemen Malaysia dipimpin oleh Ismail Mohamed Said. Melalui jalinan hubungan

antar parlemen inilah Timwas TKI LN menyarankan pemerintah Malaysia untuk menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia di dalam kerjasama dua negara di berbagai bidang khususnya di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Sehingga jika terdapat tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terlibat masalah hukum, maka majikan yang melakukan tindakan kekerasan terhadap TKI pun harus dikenai sanksi setimpal.

“Kami memerlukan data yang akurat. Sangat sedih mendapati ribuan-WNI di penjara Malaysia, 174 orang menunggu vonis mati, demikian proses hukum yang berlangsung di Malaysia kiranya tidak berat sebelah. Seperti misalnya pada persoalan pemutihan TKI di Malaysia itu, yang terkena sanksi hanya pekerja dari Indonesia.” ujar anggota timwas Rieke Diah Pitaloka, di Gedung Parlemen Malaysia, di Kuala Lumpur, Jumat (15/11).

Ia menambahkan, penanganan hukum di Malaysia selayaknya diterapkan tanpa diskriminasi. Sebab, tidak sedikit kasus yang diakibatkan ulah para majikan TKI terkait.

Dalam beberapa kasus yang dialami

TKI di Malaysia, kebanyakan di antara mereka mengalami pengekanan oleh para majikannya. Hal itu dialami oleh sebagian besar TKI yang kabur dari majikan dan menetap sementara di penampungan (*shelter*) TKI di KBRI untuk Malaysia.

Hampir seluruh paspor TKI yang tengah dalam perlindungan KBRI di Malaysia itu sengaja ditahan oleh para majikan. Modus “menahan paspor” itu dilakukan agar para TKI yang melawan dan kabur terpaksa harus kembali ke majikannya.

Perwakilan Parlemen Malaysia



Delegasi Timwas TKI-LN berdialog dengan TKI di Malaysia.

yang menerima delegasi Timwas TKI DPR, Ismail Mohamed Said mengatakan, Parlemen Malaysia akan terus melakukan pendataan dan menindaklanjuti laporan terkait TKI dan WNI lain yang ada di Malaysia.

“Selain satu rumpun, kami menganggap Parlemen Indonesia sebagai kakak. Kami akan berupaya membantu,” ujarnya. Parlemen Malaysia pun mengaku akan membantu Indonesia dalam tahapan Pemilu 2014 bagi WNI di Malaysia.*(ry)*

Timwas TKI Pertanyakan Uji Tulang dan Psikologis Dilakukan Belakangan

Wakil Ketua Tim Pengawas DPR RI terhadap perlindungan TKI, Poempida Hidayatullah mempertanyakan kenapa gagasan cerdas seperti uji tulang dan uji psikologis yang disampaikan Tim Pengacara atas kasus Wilfrida Soik baru tergagas baru-baru ini saja. Padahal kasus ini sudah ada sejak tahun 2010 silam.

Sebenarnya selama ini proses atau strategi pembelaan hukum untuk Wilfrida seperti apa? Kenapa gagasan cerdas itu baru teretus belakangan ini, setelah kasus ini terekpos media dan mendapat perhatian public, serta tokoh politik. Padahal kasus ini sudah ada sejak tahun 2010. Jangan sampai pemerintah Indonesia yang telah membayar fee lawyer malah mendapati pengacara yang tidak professional,” ungkap Poempida Hidayatullah di Press Room DPR RI, Selasa (19/11).

Ia berharap agar pembela atau pengacara yang sudah dibayar pemerintah dan Negara dalam kasus-kasus TKI di luar negeri dapat bekerja secara profesional. Khusus untuk kasus Wilfrida, jika ia bisa diselamatkan, maka kasus ini bisa menjadi model untuk pembelaan di kasus-kasus lainnya kelak.

Sementara itu Wakil Ketua Timwas TKI lainnya, Zulmiar Yanri optimis



Delegasi Timwas TKI ke Malaysia saat memberikan Keterangan Pers.

TKI asal NTT itu dapat terbebas dari hukuman mati. Mengingat dalam tes kedokteran forensik tulang dan gigi, saat peristiwa itu terjadi dirinya masih di bawah umur. Selain itu ia yakin test psikologis akan membuktikan bahwa tekanan yang begitu besar secara psikis dan fisik membuat seseorang termasuk Wilfrida menjadi labil dan bisa melakukan apa saja.

Timwas TKI akan terus memantau kasus ini. Hakim sudah mengizinkan

Wilfrida menjalani tes psikologis pada saat kejadian pembunuhan berjalan. Tes tersebut akan dilakukan di rumah sakit yang sudah ditunjuk. Sidang lanjutan untuk penyampaian hasil test psikologis tersebut akan digelar satu bulan berikutnya, atau sekitar akhir Desember 2013 di Mahkamah Tinggi, Kota Bahru Kelantan Malaysia. Kami yakin Wilfrida dapat terbebas dari hukuman mati,” ujar Zulmiar meyakini.
(ayu) foto: ry/parle.a

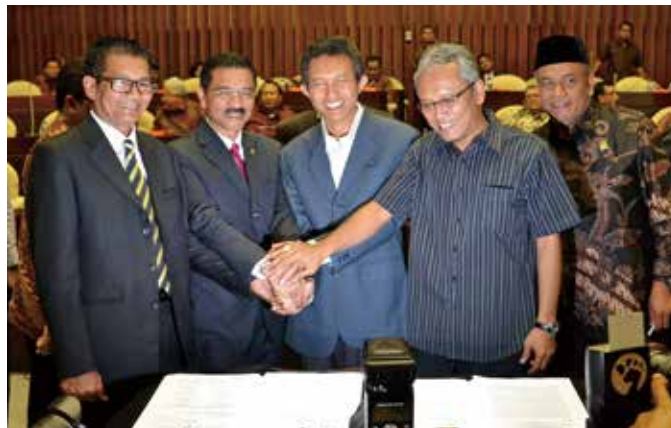
Komisi II DPR Setujui Revisi RUU Adminduk Dibawa Ke Paripurna

“Setelah mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi dan Pemerintah, kami ingin meminta persetujuan, apakah *Draf* RUU atas Perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), kita setuju guna dibicarakan lebih lanjut pada pembicaraan TK II untuk proses pengambilan keputusan di Sidang Paripurna 26 November mendatang,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar saat Raker dengan Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Kamis (21/11)

“Setuju.....” sahut anggota Komisi II DPR bersamaan, dan palu pun diketuk serta dilanjutkan dengan penandatanganan naskah *Draf* RUU yang final.

Dalam pernyataannya, Agun menyampaikan apresiasinya bahwa di awal masa sidang ini, Komisi II DPR telah mampu menghasilkan sebuah sumbangan yang cukup baik buat Negara tercinta ini, “Kami yakin dengan revisi atas UU No.23 Tahun 2006 ini akan terjadi sebuah perubahan yang sangat mendasar pada Negara kita, rakyat dengan serta merta akan memiliki KTP seumur hidup, dan anggaran pun akan lebih hemat, karena tidak perlu rakyat setiap 5 tahun cetak kartu dan sebagainya,” terang Agun.

Ia menambahkan, dengan adanya RUU ini, akan menjadi satu-satunya sumber data untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, kepentingan pemilu dan lainnya, “Bahkan ini akan menjadi data yang akan menjadi pintu masuk bagi pelayanan publik dalam bentuk apapun,” jelas Agun.



Pimpinan Komisi II DPR dan Mendagri Gamawan Fauzi menyetujui revisi RUU Adminduk dibawa ke Paripurna.

Di kesempatan ini, Agun mengharapkan, pasca penetapan perundang-undangan ini DPR berharap Kemendagri untuk dapat menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya, agar lebih aplikatif dan bisa lebih operasional, sehingga apa yang menjadi kepentingan masyarakat bisa betul-betul terlindungi.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan pemerintah sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada Komisi II DPR atas pembahasan sejak dari awal sampai pada tingkat I ini, “Kami sekali lagi sangat setuju apabila ini dibawa pada Rapat Paripurna TK II,” tegasnya. (nt) foto : ry/parle.

RUU Pengelolaan Kebudayaan Fasilitasi Dialog Antar Budaya



Dedi Suwandi Gumelar saat menjadi nara sumber dalam Forum Legislasi.

Makna kebudayaan sangat luas dan universal. Membincang kebudayaan tidak bisa sektoral. Ia melibatkan semua aspek. Ketika DPR hendak merancang RUU Pengelolaan Kebudayaan, maka RUU ini harus memfasilitasi dialog antarbudaya. Itulah yang sangat urgen.

Demikian mengemuka dalam acara Forum Legislasi yang membicarakan RUU Pengelolaan Kebudayaan di Press Room DPR, belum lama ini. Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi X DPR Dedi Suwandi Gumelar (F-PDI Perjuangan), budayawan Betawi Ridwan Saidi, dan Bambang Wibawarta peneliti sekaligus Wakil Rektor UI.

RUU ini ternyata sudah mengendap 10 tahun yang merupakan warisan dari

DPR periode sebelumnya. Dedi Gumelar alias Miing, mengungkapkan, RUU ini sudah mengumpulkan dan membahas DIM. Diharapkan pada masa sidang yang akan datang sudah masuk ke Baleg DPR. Ironisnya, UU Cagar Budaya dan UU Perfilman malah sudah diundang lebih dulu. Padahal, kedua UU itu merupakan “anak sungai” dari induknya yang hingga kini belum diundang.

Banyak persoalan yang dibahas dalam pengelolaan kebudayaan. Dari mulai kesenian hingga perilaku masuk dalam konten RUU ini. Tujuannya tentu untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Bambang Wibawarta, ada 4 aspek penting dalam membahas kebudayaan. Pertama, pengetahuan kebudayaan harus menjadi perilaku anak bangsa. Kedua, kebudayaan bisa

dikaitkan dengan diplomasi. Ketiga, kebudayaan terkait pula dengan ekonomi. Dan keempat, kebudayaan sebagai pemersatu bangsa.

Saat ini kita kerap salah kaprah, kata Bambang. Makna kebudayaan dipersempit hanya sebatas berkesenian. Lihat buku-buku teks pelajaran di sekolah. Materi kebudayaan ternyata dimaknai dengan seni tari. Padahal bukan hanya itu. Kebudayaan sangat luas. Bagaimana dengan RUU ini nantinya bisa mengantar pada dialog antarbudaya di Tanah Air. Antarsuka dan adapt bisa disandingkan bukan dipertandingkan.

Kebudayaan ini bila tidak dikelola dengan baik, akan selalu terjadi benturan. Lihatlah konflik antaretnis be-

gitu banyak terjadi. Sementara itu budayawan Ridwan Saidi, berpendapat, perkawinan adat adalah masalah budaya. Dia tak wajib dicatat di kantor catatan sipil, karena ini menyangkut tradisi yang sudah ribuan tahun ada di Indonesia. bila masih ada kewajiban pencatatan, berarti ada diskriminasi.

Ridwan menyambut baik tiga provinsi yang ternyata sudah punya Perda Kebudayaan, yaitu Aceh, Riau, dan Yogyakarta. Sebagai warga Betawi, ia kecewa Jakarta belum punya Perda tersebut. Padahal, itu sangat penting. Dan rumusan Perdanya sudah selesai dibahas di tingkat perancang, tinggal diajukan ke DPRD. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut nasib rancangan Perda tersebut. (mh), foto : eka hindra/parle/hr.

Sekjen DPR Buka Pembekalan Asisten Anggota DPR

Acara pembekalan para asisten anggota DPR RI resmi dibuka Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Winantuningtyastiti, pada akhir Oktober. Para asisten anggota dari berbagai fraksi hadir mengikuti pembekalan ini untuk saling memahami dan menambah wawasan.

“Acara ini penting sekali, karena para asisten anggota, berangkat dari latar belakang yang berbeda. Direkrut dan ditetapkannya, memang, oleh SK Sekjen. Tetapi, betul-betul itu hak prerogatif anggota dewan. Dari berbagai backraoud yang datang berkumpul di sini tentu mereka tidak punya pengalaman. Bahkan mungkin sebelumnya tidak terbayang apa, sih, tugas DPR,” urai Sekjen usai membuka acara pembekalan.

Keberadaan para asisten ini sangat strategis untuk membantu kinerja para anggota dewan. Dari para asisten inilah semua data dan informasi yang dibutuhkan anggota dewan diberikan. Sekretariat Jenderal DPR juga, memberi kemudahan akses informasi dan data kepada para asisten anggota.

“Forum seperti ini penting. Dalam rapat-rapat BURT dikemukakan bahwa kesekjenan harus memberikan pembekalan, pemahaman kepada para asisten anggota. Penting, supaya mereka tahu apa yang mereka lakukan itu betul-betul ada tujuannya. Tahu fungsi dan tugas anggota dewan,” jelas Sekjen lebih lanjut.

Acara ini merupakan perhelatan yang kedua kalinya untuk para asisten anggota. Selanjutnya akan digelar secara berkala, seperti juga acara pembekalan untuk para tenaga ahli. Banyak fasilitas yang akan diberikan Sekretariat Jen-



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti.

deral DPR untuk para asisten anggota, seperti kemudahan akses kerja, perpustakaan, dan lain-lain. Muaranya tentu untuk kepentingan anggota dewan.

Dalam sambutan pembukaannya, Sekjen juga mengatakan, ini sekaligus menjadi forum silturahmi antarasisten untuk saling kenal. Dengan mengetahui perannya sebagai asisten anggota, diharapkan imaje DPR juga ikut membaik di masyarakat. Di penghujung acara Sekjen sempat menyematkan secara simbolis tanda peserta kepada 2 asisten anggota. Selanjutnya para asisten tersebut dibagi menjadi 3 kelas berbeda untuk menerima materi dari para narasumber. (mh) foto: odjie/parle.

Industri Pers Harus Kembangkan Pers Nasionalis



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menjadi pembicara dalam acara Press Gathering di Semarang.

Industri pers harus mengembangkan idealismenya menjadi pers nasionalis, yaitu pers yang membela kepentingan nasional dan selalu melakukan kontrol sosial. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie, pada acara Press Gathering Koordinatoriat Wartawan DPR RI di Semarang, baru-baru ini.

Menurut Marzuki, obyektifitas pemberitaan harus dimulai dengan melakukan *check and recheck*. Dengan begitu pers menjadi profesional. Tak ada lagi berita-berita yang tendensius muncul di media publik. Lembaga-lembaga negara juga diharapkan tidak melakukan intervensi kepada pers.

Acara yang berlangsung di Hotel Grand Candi Semarang, ini dihadiri 83 wartawan dari berbagai media nasional dan

daerah. "Pers nasional adalah pers yang menyadari bahwa fungsi dan perannya adalah untuk membela kepentingan nasional. Berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial," kata Marzuki.

Dalam kesempatan itu, Marzuki juga mengurai sejarah pers nasional dari sejak zaman kolonial hingga era reformasi. Di masa kolonial, pers terbagi tiga, antara pers untuk kepentingan pemerintah kolonial, pers Cina yang dikelola masyarakat Cina dengan menggunakan bahasa Cina, dan pers pribumi sebagai corong organisasi pergerakan nasional. Pers pribumi waktu itu masih bersifat kedaerahan.

Memasuki era 1945-1950-an, pers kita betul-betul menjadi pers perjuangan atau alat untuk meraih kemerdekaan bangsa. Tapi, pada sepuluh tahun kemudian (1950-1960-an), pers menjadi partisan dan alat propaganda politik. Hampir semua partai politik waktu itu memiliki media sebagai corongnya. Di era ORBA pers mengalami depolitisasi dan komersialisasi. Bahkan, pada 1990-an, pers mulai melakukan repolitisasi lagi, ia tampil lebih kritis terhadap semua kebijakan pemerintah ORBA.

Baru pada masa reformasi, pers menikmati kebebasan pers. Di masa ini pers mengalami industrialisasi dan komersialisasi. "Media adalah industri yang menghasilkan komoditas, maka unsur komersial menjadi menonjol. Komersial adalah implikasi dari revolusi media yang mendorong media dengan visi ekonomi. Pihak yang menentukan proses komunikasi adalah pemilik modal, di mana kondisi ini berpengaruh pada visi media," jelas Marzuki. (mh), foto : hindra, riska/parle/hr.

Setjen DPR Tanggap Literasi Informasi

Perpustakaan DPR RI mengadakan *workshop* Literasi Informasi untuk karyawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan yang dilaksanakan dalam masa reses ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja kesetjanaan sebagai pendukung utama tugas-tugas kedewanan.

"Dalam setiap rapat di DPR terkadang kita perlu segera menyiapkan bahan referensi. Dengan pemahaman Literasi Informasi yang baik kita bisa mencari referensi tanpa harus meninggalkan ruangan, tanpa datang langsung ke perpustakaan," kata Kepala Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI) Setjen DPR, Damayanti saat membuka *workshop* di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/13).

Ia menambahkan kegiatan pelatihan akan banyak



Kepala P3DI Setjen DPR, Damayanti memberikan cinderamata kepada Utami Budi Rahayu Hariyadi, pembicara dari UI.

melakukan praktek sehingga Literasi Informasi yang berbasis teknologi informasi akan lebih mudah dipahami. Secara khusus dia juga memberikan apresiasi kepada Perpustakaan DPR yang saat ini sudah tanggap terhadap kebutuhan pe-

mustaka dengan menyediakan 10 layanan *online*.

Sementara itu Utami Budi Rahayu Hariyadi, pembicara dari Departemen Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia mengingatkan seseorang yang berliterasi informasi harus bisa mengenali kapan ia membutuhkan informasi dan mempunyai kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang dibutuh-

kannya dengan efektif.

"Literasi Informasi tidak sekedar mengetahui cara menggunakan komputer untuk mencari informasi, tapi juga membantu memanfaatkan informasi yang relevan dengan efektif dan efisien serta etis sebagai dasar pembuatan keputusan," tekannya. *(iky)foto: wahyu/parle.*

Siapkan SDM Handal Hadapi AFTA

Tenaga pendidik dan guru merupakan salah satu profesi yang mampu menopang serta melahirkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas agar mampu bersaing di tengah perkembangan jaman. Untuk meningkatkan SDM yang handal dan berahlak haruslah dimulai dari peran serta para tenaga pendidik dan guru.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memberikan kuliah umum dengan tema Peningkatan Sumber Daya Manusia, kepada mahasiswa, guru, dan dosen di Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Tarutung, Sumatera Utara, Kamis (14/11).

Lebih lanjut Marzuki mengatakan, tanpa ada guru dan tenaga pendidik sangat mustahil anak-anak di Indonesia kelak akan mempunyai SDM yang handal serta mampu bersaing sesuai dengan harapan bangsa. Padahal menurutnya, SDM yang handal merupakan alat yang bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan berkembang serta tidak mudah dikuasai bangsa lain.

Dalam upaya peningkatan SDM masyarakat Indonesia, saat ini DPR sudah memberikan perhatian serius kepada para guru dan tenaga pendidik agar semakin termotivasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Salah satunya, dengan mendorong pemerintah agar memberikan berbagai tunjangan kepada para tenaga pendidik baik di



Ketua DPR RI Marzuki Alie

sekolah negeri maupun swasta.

"DPR mendukung kebijakan pemerintahan selama 10 tahun terakhir yang pro pendidikan demi peningkatan SDM Indonesia, dengan memberikan berbagai tunjangan kepada para pendidik, baik di sekolah negeri maupun swasta,"ujarnya.

Marzuki menilai, pada era pemerintahan jauh sebelumnya profesi guru memang sering dianggap salah satu pekerjaan yang kurang mendapat perhatian, terpinggirkan, dan termarginalkan. Hal ini berdampak buruk pada dunia pendidikan karena dengan kurangnya perhatian kepada tenaga pendidik tentu minat seseorang menjadi guru minim, dan SDM semakin menurun.

"Adanya kebijakan pemerintah memberikan berbagai tunjangan kepada para guru, saat ini banyak anak

bangsa yang mempunyai pendidikan tinggi, tertarik menjadi guru,"katanya disambut tepuk tangan para mahasiswa yang hadir. Dengan adanya berbagai tunjangan ini dia berharap guru semakin termotivasi menjalankan tugasnya secara benar, dan sungguh-sungguh memberikan pengajaran kepada anak didik.

Kepada para mahasiswa, dia berharap agar tetap teguh menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan mencintai bangsa dan tanah air. Hal ini bertujuan agar negara RI tetap utuh serta tidak mudah diganggu atau dikuasai negara asing. Ini juga terkait kesiapan Indonesia, dengan sumber daya manusia yang unggul dalam menghadapi *Asean Free Trade Area/Asean Free Trade Agreement (AFTA)*, yang akan mulai bergulir pada tahun 2015 mendatang. "Sebab, Indonesia adalah satu walaupun beraneka ragam suku, dan agama, kita harus tetap menjunjung tinggi semangat nasionalisme," ucapnya.

Dilain pihak, Ketua STAKPN Tarutung, Ibelala Gea dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua DPR RI Marzuki Alie memberikan kuliah umum di Kampus STAKPN. Ibelala Gea mengatakan sebagai lembaga pendidikan STAKPN juga turut membantu pemerintah dalam upaya menciptakan SDM masyarakat Indonesia yang lebih baik. *(Naefuroji), foto: od/parle/hr.*

Sebanyak 36 RUU Masuki Pembicaraan Tingkat I

DPR memahami adanya kritik masyarakat mengenai rendahnya produk undang-undang yang dihasilkan. " Dewan memahami kritik ini, namun masyarakat juga perlu memahami, bahwa fungsi perundang-undangan dilaksanakan

oleh dua lembaga yaitu DPR dan Pemerintah," ungkap Ketua DPR Marzuki Alie ketika membuka Masa Persidangan II tahun 2013/2014 di Gedung DPR, Senin (18/11).



Ketua DPR RI Marzuki Alie membuka Masa Persidangan II tahun 2013/2014.

Ketua DPR yang didampingi para Wakil Ketua selanjutnya mengemukakan, seringkali proses pembahasan RUU tidak berjalan mulus karena ketidaksepahaman atas materi-materi perundang-undangan, baik antara DPR dengan Pemerintah, khususnya RUU dari DPR. Namun demikian, sebagaimana amanat Kontitusi, Ketua DPR mengharapkan Dewan memberi-

kan yang terbaik dalam usaha menyelesaikan berbagai hambatan tersebut.

Pada masa persidangan II, lanjut dia, ada 36 RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, 29 RUU diantaranya telah mengalami perpanjangan waktu pembahasan. Kesempatan itu diharapkan bisa digunakan secara optimal oleh Pansus, Komisi maupun

Baleg untuk dapat menuntaskannya.

Sejumlah RUU diharapkan selesai pada masa sidang ini diantaranya RUU tentang Desa, RUU tentang Perubahan UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dan RUU tentang Perubahan atas UU No.30/2004 tentang Jabatan Notaris.

Selain 36 RUU, terdapat 69 RUU kumulatif terbuka yaitu RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sedang ditangani Komisi II. RUU Kumulatif terbuka lainnya sebagai akibat putusan MK yaitu RUU Perubahan Atas No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan RUU tentang Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir.

Selain itu, sambung Ketua DPR, ada 29 RUU yang sedang dalam proses penyusunan dan perumusan, dan beberapa RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden, menunggu penunjukan menteri yang akan menangannya. (mp), foto : wahyu/parle/hr.

DPR Perlu Kritisi WTO dalam Konferensi di Bali

Anggota Komisi VII DPR RI Totok Daryanto menilai dampak positif keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak signifikan. Oleh sebab itu dalam sidang *Parliamentary Conference on WTO (PC WTO)* yang akan dilaksanakan di Bali 2-5 Desember nanti, DPR patut bersikap tegas, kalau perlu menyuarakan keluar dari organisasi itu.

"Saya kira sudah saatnya kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak bisa hanya dijadikan pasar untuk produk asing tetapi juga harus mampu tunjukkan kita adalah kekuatan ekonomi yang diperhitungkan, kalau perlu kita keluar dari WTO untuk menunjukkan kita ini tidak bisa disepelekan oleh siapapun," katanya saat menyampaikan interupsi dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/13).

Ia menyebut salah satu kasus ketika masalah minyak sawit mentah (*crude*



Anggota Komisi VII DPR RI Totok Daryanto (kanan).

palm oil) yang menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia dipermasalahkan tidak ramah lingkungan oleh negara-negara maju, Amerika dan Eropa. Akibatnya CPO Indonesia tidak mendapat prioritas pengurangan tarif masuk 5 persen dalam Forum APEC

sehingga tidak kompetitif dibanding minyak nabati lain.

"Kita punya produk *crude palm oil* yang terancam di Eropa, ini juga tidak mendapat perhatian dari WTO," lanjut politisi dari Fraksi Partai Amanat

Nasional ini.

Dalam rapat paripurna tersebut Ketua DPR Marzuki Alie menyampaikan DPR akan menjadi co-host PC WTO yang digelar IPU (*Inter-Parliamentary Union*) dan Parlemen Eropa. Kegiatan

ini dilaksanakan bersamaan dengan acara *The 9th Ministerial Conference of the WTO*. Konferensi di Pulau Dewata ini akan menyuarakan transparansi eksternal WTO dan bertanggung jawab kepada parlemen sebagai wakil rakyat.

"Bagi DPR ini merupakan kehormatan untuk mendukung penyelenggaraan *Parliamentary Conference on the World Trade Organization* di Bali," demikian Marzuki. (iky)/foto: wahyu/parle/iw.

Perppu MK Relevan Dibahas dan Diterima DPR



Anggota DPR Aria Bima.

Citra Mahkamah Konstitusi (MK) menyusul tertangkapnya mantan

Ketuanya Akil Mochtar dan rusuh saat sidang sengketa Pilkada di gedung MK baru-baru ini, sangat terpuruk dan terjadi delegitimasi yang sangat parah. Pasalnya terjadi kecenderungan beberapa keputusan hasil Pilkada yang mulai terkuak dengan keputusan MK, sangat beraroma -dan sebagian terbukti ada tindak pidana korupsi.

"Jadi terlihat sekali bahwa MK mengalami delegitimasi kelembagaan yang luar biasa di mata publik. Karena itu, keluarnya Perppu No.1/2013 tentang Perubahan Kedua atas UU MK relevan untuk dibahas dan diterima oleh DPR," ungkap anggota DPR Aria Bima, di Gedung Nusantara II DPR sebelum dimulainya Rapat Paripurna, Senin (18/11).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, Perppu tersebut efektif untuk memulihkan kembali citra lembaga MK yang sekarang ini mengalami proses delegitimasi yang parah. Apalagi, MK merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas final dari segala persoalan yang dilakukan oleh lembaga negara lainnya.

Dengan kondisi itu, Aria Bima berharap Perppu akan diterima DPR dan akan menjadi solutif dalam penyelesaian di tubuh MK. Untuk itu sebaiknya MK *defend* dulu. "Tidak perlu bikin apa-apa dulu, tidak perlu melakukan langkah-langkah sebelum Perppu ini dibahas dan diterima DPR," demikian Aria Bima. (mp)/foto: iwan armanias/parle.

DPR RI Kecewa Penyadapan Yang Dilakukan Amerika Serikat dan Australia

DPR RI sangat prihatin terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Negara Amerika Serikat dan Australia. Penyadapan ini juga merupakan ujian bagi Indonesia di dalam memaknai kedaulatan Indonesia di hadapan pada Pemimpin dunia.

"Penyadapan yang dilakukan melalui kedutaan besarnya di Jakarta, merupakan persoalan serius dalam hubungan antar negara," kata ketua DPR Marzuki Alie, dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (18/11).

Dewan mendukung langkah Menteri Luar Negeri RI memanggil Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Duta Besar Australia sekaligus meminta penjelasan mengenai isu penyadapan ini. Namun menurut Marzuki, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia sepatutnya tidak terjebak dalam kerangka pikir pragmatis demi kepentingan diplomasi semata, melainkan harus melihat sebagai ujian kedaulatan bangsa Indonesia.



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

"Indonesia harus menuntaskan persoalan ini secara tegas, misalnya kepala negara minta penjelasan langsung kepada kedua kepala negara tersebut sekaligus untuk membangun

kesepakatan baru secara bilateral serta komitmen untuk mengentikan penyadapan negara lain,” jelas Marzuki.



Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzzammil Yusuf.

Al Muzzammil Yusuf anggota Dewan dari Fraksi PKS mengusulkan agar DPR RI secara resmi mengundang Duta Besar Amerika Serikat dan Australia untuk memberikan pernyataan secara terbuka di Komisi I DPR.

“Kami menyarankan kepada Forum Rapat Paripurna DPR, menugaskan kepada Komisi I untuk mengundang dua Dubes yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan terbuka kepada rakyat Indonesia atas apa yang telah mereka lakukan terhadap kehormatan bangsa ini,” katanya.

Menurutnya, parlemen pada tempatnya untuk bisa ikut mendukung upaya agar sesama bangsa berdaulat saling menghormati, oleh karena itu

pada tempatnya mereka untuk memberikan penjelasan pada forum rumah rakyat ini. “Pada tempatnya DPR melakukan peran untuk menghormati kedaulatan rakyat Indonesia,” ungkap Al Muzzammil.

Selain itu, Chairuman Harahap dari Fraksi Golkar, berpendapat DPR jangan terjebak pada sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah. “Seharusnya pemerintah harus kita desak dan harus kita minta pertanggungjawabannya terhadap reaksi yang diberikan atas kejadian-kejadian ini,” katanya.

Menurutnya DPR perlu memanggil Pemerintah untuk menanyakan sejauhmana tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai kedaulatan yang menunjukkan kita adalah negara berdaulat, dan kita harus menunjukkan bahwa hukum Internasional berlaku dalam hubungan-hubungan antar negara.

“Pemerintah kita undang untuk menjelaskan sejauh mana pemerintah menjaga kerahasiaan negara kita, dan menjaga percakapan warga negara kita di dalam negeri kita sendiri,” imbuhnya.

Dalam masalah penyadapan, dijelaskan Chairuman, sebenarnya tindakan-tindakan penyadapan merupakan



Anggota DPR dari Fraksi Golkar Chairuman Harahap.

tidak ilegal yang dilakukan oleh pemerintahan manapun. Tergantung kepada kemampuan intelijen untuk mendeteksinya.

Apabila terjadi atau ketahuan atau terungkap suatu kegiatan spionase intelijen oleh negara lain kepada negara kita, tentu tindakan-tindakan yang harus dilakukan pemerintah adalah memprotes berdasarkan hukum internasional atau kebiasaan diplomatik yang harus dilakukan.

“Pemerintah perlu bertindak lebih tegas untuk mengambil tindakan-tindakan diplomatik terhadap Amerika Serikat maupun Australia,” tegasnya.

Selanjutnya, Marzuki Alie menjelaskan bahwa sebagaimana mekanisme di Dewan hal ini adalah kewenangan Komisi I, jadi persilahkan Komisi I untuk menindak lanjutinya. (as)/foto: iwan armanias, od/parle.

Sekjen DPR Terima Delegasi Setjen Parlemen Afghanistan



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti beserta jajaran menerima Delegasi Sekretariat Jenderal Parlemen Afghanistan

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti beserta jajaran menerima Delegasi Sekretariat Jenderal Parlemen Afghanistan. Dalam sambutannya, Win (nama panggilan Winantuningtyastiti) menyatakan bahwa hubungan parlemen maupun pemerintah antara Indonesia dan Afghanistan dalam kondisi sangat baik.

“Hubungan kedua negara dalam kondisi sangat baik. Dengan adanya kunjungan Setjen Parlemen ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, serta menambah baik hubungan baik kedua negara kedepan-

nya,” jelas Win di Ruang Rapat Setjen, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10).

Sementara itu, Ketua Delegasi Setjen Parlemen Afghanistan Kamal Safi menyatakan bahwa ini merupakan kunjungan pertama Setjen Parlemen Afghanistan ke Indonesia. Ia dan jajarannya mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan Indonesia kepada negara yang beribukota di Kabul itu.

“Kami ucapkan terimakasih banyak untuk Indonesia. Kami berharap, pengusaha Indonesia dapat menanamkan investasinya ke Afghanistan, dan menambah beasiswa untuk pelajar Afghanistan yang ingin belajar ke Indonesia,” harap Kamal.

Menanggapi hal ini, Win menyatakan akan melaporkannya kepada Pimpinan DPR RI maupun Komisi terkait. “Hasil dari pertemuan ini akan kami laporkan kepada Pimpinan DPR. Hal-hal yang menjadi harapan Afghanistan, nantinya Pimpinan akan menugaskan Komisi terkait untuk membahas dengan pemerintah,” ujar Win.

Terkait dengan kondisi Afghanistan yang usai dilanda perang, Win menyatakan rasa prihatin, dan berharap kondisi di negara itu semakin kondusif dan masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan aman.

“Kami juga berharap kunjungan antar negara ini terus berlangsung. Sedangkan dari Setjen, kita ingin mensupport supaya Dewan lebih

meningkatkan lagi perannya dalam membantu negara-negara yang relatif masih perlu bantuan, seperti Afghanistan, Pakistan, dan beberapa negara lainnya,” imbuh Win.

Usai ramah tamah antar kedua Setjen, acara dilanjutkan dengan paparan dari Deputi Perundang-undangan Johnson Rajagukguk. Dalam paparannya, pria berkacamata ini menjelaskan bagaimana proses penyusunan Rancangan Undang-undang, serta susunan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI. Dijadwalkan, besok, Rabu (20/10) Setjen Parlemen Afghanistan akan melakukan *tour building* di Kompleks Parlemen. (sf) foto: od/parle.

Pembangunan Waduk Jati Gede Terkendala Soal Ganti Rugi

Anggota Komisi V DPR dari Partai Golkar Eldie Suwandie mengatakan, persoalan pembangunan Waduk Jati Gede masih terkendala persoalan sosial dan ganti rugi bagi warga yang terkena dampak pembangunan Waduk tersebut.

“Masih banyak ditemui kendala yuridis di lapangan dan harus diverifikasi, pendataan dan pengukuran ulang sehingga memang perlu waktu untuk menyelesaikannya,” ujar Eldie se usai RDPU dengan DPRD Sumedang, masyarakat Sumedang membahas dampak pembangunan Waduk Jati Gede, di Gedung Nusantara DPR RI, Rabu, (20/11).

Pada kesempatan itu, Eldie meminta DPRD Sumedang melakukan verifikasi ulang terkait masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan waduk Jati Gede.

“Persoalan ganti rugi kendalanya memang perlu payung hukum, yaitu Kepres agar semua kegiatan dapat diselesaikan. Memang sejak tahun 1984 sudah ada pembebasan lahan namun karena harganya tidak sesuai masyarakat sekarang banyak yang



Anggota Komisi V DPR Eldie Suwandie.

menolakny,” tambahnya.

Menurutnya, Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 1,5 triliun untuk pembebasan lahan, konstruksi dan kompensasinya. “Persoalan lainnya ada sekitar 1500 hektar sawah hilang akibat pembangunan waduk Jati Gede ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, daya serap pembangunan Waduk ini sangat rendah. Karena memang masih banyak kendala dilapangan khususnya persoalan sosial seperti pembebasan lahan yang masih belum tuntas. Karena itu, lanjutnya,

dirinya mendukung segera diadakan pertemuan antara DPR RI, pemerintah diwakili oleh Menteri Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, DPRD Provinsi Jabar, Gubernur Jabar, dan DPRD Sumedang.

Ketua Pansus Waduk Jati Gede DPRD Sumedang Edi Askhari mengungkapkan lambatnya Pemerintah dalam merealisasikan pengembangan Waduk hanya membuat penderitaan warga Jatigede Sumedang. “Tidak ada manfaat yang membantu penderitaan warga atas pembangunan Waduk, sampai pemerintah tidak memperhatikan dan peka atas kebutuhan dari warga Sumedang yang terkena proyek pembangunan Waduk Jati Gede semakin menjadi masalah yang krusial dan penderitaan yang tidak berujung penyelesaiannya,” tandasnya.

Selain persoalan sosial, pemerintah daerah juga dibebani persoalan rumah tumbuh hingga hutan lindung yang terkena dampak langsung pembangunan tersebut. “Diharapkan persoalan-persoalan tersebut bisa mendapatkan solusi dari pemerintah,” ujarnya. (si/sy)/ foto: iwan armanias/parle.

Komisi III Apresiasi Kapolri Izinkan Polwan Berjilbab

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf menyampaikan apresiasi atas sikap Kapolri yang membolehkan Polisi Wanita (Polwan) berjilbab pada saat melaksanakan tugas. Langkah ini dinilai sebagai bentuk konsistensi dari Jenderal Pol. Sutarmanto saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dan meneruskan kebijakan Kapolri sebelumnya.

"Kita ucapkan selamat, ini bentuk konsistensi antara Kapolri yang lalu Pak Timur dengan Pak Sutarmanto. Kapolri sebelumnya sudah melaporkan dalam rapat resmi dengan Komisi III rancangan 62 model jilbab yang akan digunakan. Ini kemudian dikuatkan Pak Sutarmanto pada waktu beliau *fit proper test*," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/13).

Namun, ia mengingatkan sikap yang disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan sejumlah media dan wartawan di Mabes Polri ini hendaknya segera diikuti dengan menerbit-



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf.

kan Surat Keputusan - SK Kapolri. Kebijakan itu akan menambah ketenangan Polwan dan mempunyai konsekuensi anggaran.

"Jadi kalau masih ada komandan yang melarang atau mempersulit, Polwan akan bisa memperkerjakan karena sudah ada SKnya. Setelah SK,

urutannya adalah pendataan untuk pengadaan seragam dan kemudian dilanjutkan penganggaran," tambahnya.

Ia memaklumi untuk tahun anggaran berjalan ini penganggaran seragam resmi plus jilbab belum dapat dilakukan. Menurutnya tepat, arahan Kapolri untuk saat ini Polwan dipersilahkan membeli sendiri dengan model menyesuaikan dengan seragam Polwan Provinsi Aceh yang telah diterapkan sebelumnya.

Politisi FPKS ini menambahkan sebenarnya sejumlah anggota Komisi III baik dari partai Islam maupun nasionalis berharap kebijakan ini dapat dikeluarkan menjelang bulan Ramadhan lalu. "Kalau itu dikeluarkan sekarang berarti hadiah Tahun Baru Islam bagi Polwan, bagian dari penghormatan terhadap HAM yang tegas diatur dalam konstitusi kita," demikian Muzammil. (iky)/foto: iwan armanias/parle.

BAKN DPR RI : Tata Kelola BUMN Buruk

Berdasarkan hasil penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2013 bahwa masih banyak terjadi kasus penyimpangan keuangan Negara di lingkungan BUMN, dan sebagian besar BUMN belum memiliki tata kelola (*Good Corporate Governance/GCG*) yang baik.

"Potensi kerugian Negara, dan kekurangan penerimaan di BUMN senilai Rp 2,60 triliun," ungkap Ketua BAKN Sumarjati Arjoso, hadir pula Anggota BAKN Eva Sundari dan Fahri Hamzah, saat Konferensi Pers di Gedung DPR, Rabu (20/11).



Ketua BAKN Sumarjati Arjoso, didampingi Anggota BAKN Eva Kusuma Sundari dan Fahri Hamzah, saat Konferensi Pers.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013 terdapat 21 Objek Pemeriksaan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil penelaahan BAKN DPR RI atas Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2013 terkait BUMN, BAKN menemukan ada 510 kasus penyimpangan keuangan Negara diantaranya sebanyak 234 kasus terkait kelemahan SPI dan sebanyak 276 kasus terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

“Dari total 510 kasus, sebanyak 93 kasus merupakan kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian,” papar Sumarjati.

BAKN DPR RI juga menyampaikan

menemukan penyimpangan 28 kasus ketidakefektifan senilai Rp 44,75 triliun di beberapa BUMN. Tingginya nilai ketidakefektifan di BUMN mengindikasikan bahwa pengelolaan kegiatan di BUMN tidak tepat sasaran.

Lebih lanjut, Sumarjati mengatakan bahwa hasil penelaahan BAKN terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI atas BUMN tersebut, BAKN DPR RI berkesimpulan bahwa memisahkan kekayaan BUMN dari Keuangan Negara sebagaimana diinginkan oleh beberapa pihak yang mengajukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke Mahkamah Konstitusi adalah tidak tepat dan harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut BAKN, Hal ini didasarkan karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yaitu ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, kemudian ayat (3) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Yang harus dipisahkan adalah pengelolaan BUMN, yang harus profesional dan *independent* dengan melepaskan campur tangan politik dan kekuasaan pada bisnis BUMN,” tegasnya. (as) foto: wahyu/parle

Ketua DPR Gelar Pertemuan dengan Presiden Iran

Dalam rangkaian kunjungan ke Iran Rabu (20/11), Delegasi DPR yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie menggelar pertemuan dengan Presiden Negara Republik Islam Iran Hassan Rouhani. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR mengucapkan rasa belasungkawa kepada bangsa Iran atas insiden ledakan di depan gedung Kedutaan Besar Iran di Beirut.

“Mereka yang melakukan aksi-aksi ini adalah pihak-pihak yang kalah dan membuktikan ketidakberhasilan mereka diantara masyarakat Iran.” ungkap dia. Ketua DPR Marzuki Alie juga berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Iran yang sudah terjalin selama ini dapat terus diperluas disegala bidang.

Delegasi DPR juga melakukan kunjungan ke *Research Institute of Petroleum Industry* (RIPI). Delegasi berdiskusi mengenai kemungkinan kerjasama dalam memaksimalkan sumur-sumur tua yang banyak tersebar di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta berharap negara Islam Iran mau membantu serta memberikan ilmu serta pendidikan mengenai pemaksimalan eksplorasi sumur tua. Setelah berdiskusi delegasi melakukan



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat pertemuan dengan Presiden Negara Republik Islam Iran Hassan Rouhani.

peninjauan fasilitas yang tersedia di *Research Institute of Petroleum Industry* (RIPI).

Selanjutnya Delegasi DPR RI juga melakukan lawatan dan melihat aktivitas di Gedung Tehran Stock Exchange. Dalam perbincangan dengan Direktur Tehran Stock Exchange diketahui bahwa hampir mayoritas penduduk negara Republik Islam Iran mempunyai saham. Di Iran ada empat pasar bursa besar, salah satunya pasar bursa energi dan dalam perdagangan nega-

ra Islam Iran juga menganut sistem perdagangan dengan sistem Syariah.

Pada rangkaian acara terakhir, Delegasi DPR menggelar pertemuan dengan masyarakat Indonesia yang bersekolah dan bekerja di negara Republik Islam Iran, berlangsung di Wisma KBRI Teheran. Dalam kesempatan tersebut mahasiswa berkesempatan melakukan tanya jawab dengan Marzuki Alie sebagai Ketua DPR RI dan anggota Delegasi lainnya. (mp,dh)

DPR RI Akan Adakan Raker Gabungan Bahas Waduk Jati Gede



Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait saat diwawancara wartawan.

DPR RI akan segera mengadakan Raker Gabungan dengan Menko perekonomian Hatta Radjasa, Kepala BPN Joyo Winoto, Menteri Keuangan Chatib Basri, Gubernur Jabar Achmad Heryawan, DPRD Provinsi Jabar, DPRD Tingkat II Sumedang guna membahas persoalan sosial pasca pembangunan waduk Jati Gede.

“Persoalan ini sangat repot karena terkait sektoral dengan yang lain seperti Pekerjaan Umum, Pemda maupun pusat,” ujar anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait saat RDPU di Gedung Nusantara, Rabu, (20/11).

Menurut Maruarar, persoalan Pembangunan Waduk Jati

Gede sudah teridentifikasi selama ini namun yang belum yaitu solusi yang komprehensif. “Kita ingin memperjuangkan persoalan ini agar segera tuntas karena sudah berlarut-larut,” terangnya.

Dia menegaskan, bila kebijakan pemerintah pusat dan daerah tidak berpihak kepada masyarakat maka tentu harus kita lawan bersama. “Ini merupakan perjuangan politik kita dalam membela rakyat,” katanya.

Persoalan Waduk Jati Gede, tambahnya, menyangkut berbagai aspek mulai dari hukum, sosial dan budaya. Karena itu, solusinya juga harus diselesaikan secara komprehensif. “Pemerintah harus *clear*, kita sudah bicara dan akan segera meminta rapat kerja gabungan dengan Menkokesra, Gubernur Jabar, Kemenkeu, BPN, jadi ini tidak hanya sektoral semata,” tandasnya.

Sementara Ketua Pansus Waduk Jati Gede Edi Askhari dari DPRD Tingkat II Sumedang mengatakan, masih ada persoalan sosial terkait ganti rugi pembebasan lahan bangunan yang terlewatkan. “Terdapat 10 ribu unit masih tersebar di Kecamatan Wado, Darmaraja, Cisitu, Jatinunggal, dan Jati Gede,” paparnya.

Di sisi lain, terdapat lahan hutan seluas 1361 Hektar yang harus utuh dan tidak mengurangi luasan kawasan hutan atau kawasan lindung. “Jika tidak terealisasi maka akan melanggar Perda tentang RTRW Nasional RT RW Propinsi Jabar dan RT RW Kabupaten,” tambahnya. (si/sy)/foto: iwan armanias/parle.

Dewan Sayangkan Pemerintah Belum Umumkan Prosentase Alokasi Perangkat Desa

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Priyo Budi Santoso menyayangkan sikap pemerintah yang masih belum ingin mengumumkan berapa prosentase atau angka yang pasti dalam alokasi dana untuk perangkat desa.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima aspirasi dari forum pembaharuan desa di ruang rapat Pimpinan,

Gedung Nusantara I, Rabu (20/11).

Meski demikian, Priyo mengapresiasi niat baik pemerintah yang mau mengakomodir masukan dan tuntutan dari para perangkat desa. Diantaranya memberikan tunjangan kepada para perangkat desa yang sudah mengabdikan, melalui APBN atau dana khusus.

“Selama ini kan perangkat desa

hanya diberikan dana urunan yang berasal dari masyarakat atau bupati. Dengan dimasukkannya tunjangan untuk perangkat desa itu ke dalam salah satu klausul di RUU Desa, ini menjadi sebuah penghargaan atas sumbangsih para perangkat desa,” jelas Priyo.

Ditambahkannya, meski nominal Rp 1 miliar yang diajukannya untuk desa dalam setiap tahunnya itu tidak disetu-



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima aspirasi Forum Pembaharuan Desa.

jui pihak pemerintah, namun berapa pun yang diberikan pemerintah itu sudah menjadi sebuah hal yang positif.

"Yang pasti biar saja ada dulu tunjangan itu, berapapun itu nanti kan bisa bertahap kenaikannya," tegasnya.

Dilanjutkan Priyo, tunjangan tersebut seyogyanya sebagai pengganti, karena pemerintah tidak menyetujui tuntutan untuk menjadikan aparat atau perangkat desa itu sebagai PNS.

"Pemerintah keberatan untuk menjadikan perangkat desa sebagai PNS, karena perangkat desa jumlahnya bisa lebih dari 500 ribu orang, dan APBN tidak cukup untuk itu," pungkas Politisi dari Fraksi Golkar ini.

Selain pemberian tunjangan, menurut Priyo, DPR dan Pemerintah juga telah sepakat untuk menentukan masa jabatan perangkat desa selama 6 (enam) tahun, dan bisa diangkat atau dipilih kembali sebanyak 3 (tiga) kali.

Melihat sudah adanya beberapa kesepakatan tersebut, Priyo yakin bahwa UU Desa akan selesai dan disahkan pada Desember 2013 ini. (Ayu) foto: wahyu/parle.

Soal JKN, Pusat Harus Segera Koordinasi Dengan Daerah

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tinggal beberapa hari lagi, menjelang 1 Januari 2014. Pemerintah pusat dihimbau segera lakukan koordinasi menyeluruh dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati, Rabu (20/1). Koordinasi ini penting, karena menyangkut belum meratanya standar kompetensi para dokter, ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan penentuan tarif rumah sakit. Apalagi, peraturan turunan dari UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga belum ada.

Menurut anggota F-PPP itu, seiring dengan desentralisasi, pemerintah pusat harus intens melakukan pendekatan dengan Pemda-Pemda. Di tengah arus desentralisasi ini, keberpihakan Pemda pada kesehatan dan kesejahteraan rakyat dirasa belum memadai. Di lain pihak, tampaknya hanya rumah sakit-rumah sakit vertikal saja yang terlihat berbenah menjelang



Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati.

1 Januari ini.

"Padahal, dalam program JKN ini, semua stakeholder terkait pelayanan kesehatan harus ikut berbenah, baik swasta, rumah sakit vertikal, rumah sakit satelit, atau rumah sakit afiliasi. Pusat harus segera lakukan sosialisasi agar timbul kesadaran dari Pemda dan stakeholder, sehingga ada penyamarataan dalam segala hal," katanya.

Okky menilai, untuk pelaksanaan JKN ini, Pemda DKI terlihat lebih baik. Dinas Kesehatan DKI sudah melakukan kerja sama dengan Fakultas Kedokteran UI untuk meningkatkan kompetensi dokter. Para dokter yang sudah lulus diberi kesempatan magang di Puskesmas-puskesmas. "Tujuannya win-win solution. Bagi si dokter menambah jam terbang. Sementara di puskesmas ada peningkatan kompetensi bagi para dokter yang ada di puskesmas itu," jelas Okky.

Sementara bagi para mahasiswa Fakultas Kedokteran, lanjut Okky, mereka diterjunkan ke masyarakat untuk melakukan kegiatan promotif dan preventif. Dengan begitu, masyarakat jadi lebih berdaya dan bagi calon dokter jadi punya keterampilan komunikasi kesehatan yang baik dengan masyarakat. Inilah contoh yang baik dari DKI Jakarta. Dan Pemda lainnya harus pula bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran setempat. (mh) foto: wahyu/parle

Komisi VIII Sesalkan Kelangkaan Buku Nikah

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah sesalkan terjadinya kelangkaan buku nikah. Buku nikah itu memang hanya masalah administrasi, bukan substansi dalam pernikahan. Tapi hal tersebut menurut Ida akan melengkapikan kebahagiaan pasangan suami-istri setelah resmi menikah.

“Saya sangat menyesalkan terjadinya kelangkaan buku nikah. Sebenarnya peristiwa ini sebelumnya sudah pernah terjadi, namun sifatnya tidak masif atau masal seperti sekarang, sehingga tidak terlalu besar. Namun kelangkaan kali ini terjadi di banyak daerah, sehingga bersifat masif. Hal ini membuktikan kelalaian pemerintah dalam melayani masyarakat. Ini memang hanya masalah administrasi, namun akan melengkapikan kebahagiaan pasangan suami istri setelah resmi menikah. Meski kemudian Kementerian Agama memberikan surat nikah sementara,” ungkap Ida Fauziyah yang ditemui sesaat sebelum berlangsungnya sidang Paripurna Pembukaan Masa Persiidangan II Tahun Sidang 2013-2014, Senin (18/11).

Ida belum mengetahui secara pasti penyebab dari kelangkaan atau kekurangan stok buku nikah tersebut. Namun ia menduga proses tender yang lama itu, akibat keterlambatan pengajuan RK K/L (rencana kerja Kementerian/Lembaga) kepada Komisi VIII beberapa waktu lalu. Oleh karena itu ia mendesak Kementerian Agama untuk memperbaiki manajemen atau pengelolaan anggaran dan kinerjanya.

“Kalau memang kelangkaan itu akibat keterlambatan anggaran yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, sebenarnya hal itu kan sudah bisa diantisipasi. Jika anggaran belum muncul, proses tender untuk buku nikah sebenarnya sudah bisa dilakukan, sehingga tidak sampai terjadi kekurangan atau kelangkaan stok buku nikah seperti ini,” jelasnya.

Ditambahkannya, Komisinya mendesak Kementerian Agama untuk segera mengatasi kelangkaan buku nikah ini. Bahkan dirinya berharap saat pengambilalihan atau penggantian buku nikah dengan surat nikah sementara yang



Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziyah.

diberikan petugas KUA kepada pasangan suami istri saat menikah, itu tidak dibebani biaya tambahan.

Sebagaimana diketahui, belakangan kelangkaan buku nikah terjadi di beberapa daerah seperti di Depok, Temanggung, dan beberapa kota di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB kosong. Akibatnya pasangan yang menikah selama 2 bulan terakhir, terpaksa hanya puas dengan sehelai surat keterangan nikah sementara. Dan mereka harus menukarkan surat keterangan nikah sementara itu ketika buku nikah telah tersedia di Kementerian Agama. (ayu)/
foto: iwan armanias/parle.

Soal Penyadapan, Sikap Indonesia dan Rusia Seirama

Penyadapan dalam dunia diplomasi merupakan kesalahan yang sangat fatal, karena menyangkut martabat dan kehormatan negara. Sikap Indonesia dan Rusia terutama parlemen kedua negara seirama, mengecam aksi penyadapan yang dilakukan Amerika dan Australia.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev di lobi Nusantara III DPR, Kamis (21/11). Levichev didampingi Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin. Sebelum menerima Levichev, Priyo sempat memberi keterangan pers kepada wartawan.

“Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi dan lengkap dari Australia yang bisa kita terima dengan baik. Bahkan, pernyataan Tony Abbott tidak menyelesaikan dan tidak minta maaf. Sikap PM Australia tidak satria untuk



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev.

ukuran seorang negarawan. Setahu saya seorang PM itu otomatis menanggung tanggung jawab Kepala Pemerintahan, meskipun itu dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya,” tegas Priyo.

Sosok penting di balik informasi penyadapan ini adalah Edward Snowden, mantan pegawai kontrak di Badan Keamanan Nasional Amerika yang pertama kali membocorkan kepada dunia internasional soal aksi penyadapan yang dilakukan Amerika dan Australia. Kini, Snowden berada di Rusia. Paspornya sudah dicabut oleh Amerika. “Ia dipastikan ada di Rusia. Dan sekarang didampingi oleh lawyer top di Rusia,” ungkap Priyo.

Lebih lanjut, Priyo mengungkapkan, Snowden dilindungi Presiden Rusia Vladimir Putin. Pesan Putin kepada Snowden, seperti dikutip dari keterangan Levichev, agar ia tidak membuat masalah baru dengan Amerika. Bagaimana pun Rusia tetap ingin menjaga hubungan baiknya dengan Amerika.

“Dari segi diplomasi, penyadapan tidak patut. Saya sangat gembira pandangan Wakil Ketua Parlemen Rusia ternyata sama dengan kami. Soal Edward Snowden, Wakil Ketua Parlemen Rusia menjawab, Presiden Putin melindungi kehidupan dan hak hidup Edward Snowden. Itu yang bisa dilakukan Rusia agar tidak merusak hubungan dengan Amerika,” katanya. (mh) foto : wy/parle.

RUU Kesehatan Jiwa Beri Perlindungan Jiwa Secara Menyeluruh

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf mengharapkan RUU tentang Kesehatan Jiwa dapat memberikan perlindungan kepada orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan Jiwa secara menyeluruh.

“RUU tentang Kesehatan Jiwa akan memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif mulai dari janin di dalam kandungan, bayi, balita, anak-anak, remaja, orang tua hingga manula,” kata Nova yang juga Ketua Panja RUU Kesehatan Jiwa saat memberikan keterangan pers perkembangan RUU Kesehatan Jiwa di Press Room Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/9)

Saat dialog, ketika ditanya apakah RUU Kesehatan Jiwa mengatur para koruptor yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa.

Noriyu sapaan akrab Nova, menyatakan RUU Kesehatan Jiwa akan mempersulit koruptor yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa saat menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi.

“Koruptor yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa tak bisa lagi berpura-pura karena RUU Kesehatan Jiwa akan dipakai untuk menentukan apakah seorang itu memang mengalami gangguan jiwa atau tidak. Ada bab dan pasal yang mengatur,” tukas Nova.

RUU ini akan membuat seorang koruptor yang disebut mengalami gangguan jiwa untuk diuji apakah benar atau tidak gila.

“Nanti akan diberikan sekitar 500 pertanyaan kepada orang yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa. Dari situ akan diketahui apakah benar mengalami gangguan jiwa atau tidak. Proses ini tak bisa dimanipulasi bila ada tersangka korupsi yang berpura-pura gila,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Nova juga meminta bantuan



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf

teman-teman media ikut mensosialisasikan RUU Kesehatan Jiwa.

Nova menjelaskan, Rapat Paripurna DPR RI, 24 Oktober 2013 lalu telah menetapkan RUU Kesehatan Jiwa sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Pihak Komisi IX sendiri terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memantau perkembangan RUU tersebut.

Harapannya, dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 mendatang, DPR sudah dapat membahas RUU Kesehatan Jiwa bersama dengan Pemerintah. (sc), foto : wy/parle/hr.



Wakil Ketua DPR/Korpolkam Priyo Budi Santoso menerima Delegasi Parlemen Rusia Nikolai Levichev di Loby Nusantara III DPR RI terkait hubungan bilateral kedua negara. Kamis (21/11) Foto: Wahyu/Parle/HR.



Wakil Ketua DPR/Korpolkam Priyo Budi Santoso berdialog dengan Forum Pembaharuan Desa terkait dengan RUU Desa di Gedung Nusantara III DPR RI. Rabu (20/11) Foto: Wahyu/Parle/HR.



Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dipimpin Michael Wattimena meninjau pembangunan Ringroad Jayapura. Rabu (30/10). Foto: Iwan Armanias/Parle/HR.



Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dipimpin Laurens Bahang Dama meninjau pembangunan Embung Bengawan di Tarakan Kalimantan Utara. Senin (28/10). Foto: Iky/Parle/HR.



Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dipimpin Sutan Bathoegana meninjau langsung infrastruktur gas di PT. CNOOC Wilayah DKI Jakarta. Rabu (30/10). Foto: Wahyu/Parle/HR.



Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Manokwari dipimpin Ledia Hanifa meninjau bekas lokasi banjir di Distrik Wosi Dalam, Manokwari - Papua Barat. Senin (28/10). Foto: Ayu/Parle/HR.